



**Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 4, No. 2, 2023**

## **ANALISIS PENGELOLAAN DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PASIRIPIS**

**Marlinda<sup>1\*</sup>, Ade Sudarma<sup>2</sup>**

<sup>1\*</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

[Marlindamelin5977@gmail.com](mailto:Marlindamelin5977@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [adesudarma@ummi.ac.id](mailto:adesudarma@ummi.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine how the management and accountability of financial statements of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Pasiripis Village. The method used is a descriptive qualitative approach, data collection techniques namely by observation, interviews and documentation, data analysis techniques namely by data collection, data reduction, data presentation and verification conclusions.*

*The result of this study is to analyze the presentation of reports that still use ordinary cash book reports in general and management, namely planning, organizing, actuating, controlling. For accountability, namely vertical accountability (internal) and horizontal accountability (external).*

**Keywords:** *Management, Accountability, Financial Statements, BUMDes*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan akuntabilitas laporan keuangan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasiripis. Metode yang digunakan merupakan deskriptif pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah menganalisis penyajian laporan yang masih menggunakan laporan buku kas biasa pada umumnya dan pengeleleloan yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling). Untuk akuntabilitas yaitu akuntabilitas vertikal (internal) dan akuntabilitas horizontal (eksternal).

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Akuntabilitas, Laporan Keuangan, BUMDes*

### **PENDAHULUAN**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perekonomian masyarakat sebagai tiang perekonomian desa, yang berperan sebagai lembaga sosial yang mendukung kepentingan masyarakat dengan berpartisipasi dalam penyediaan atau layanan sosial. Selain itu, berfungsi sebagai unit usaha dengan

tujuan mencari keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal (barang dan jasa). BUMDes badan usaha hukum yang didirikan berdasarkan peraturan undang-undang yang ada, berdasarkan kesepakatan yang dibangun di masyarakat desa. Oleh karena itu, bentuk BUMDes di Indonesia dapat berbeda sesuai dengan karakteristik lokal, peluang dan sumber daya masing-masing desa (Anonymus, 2007:3).

Dalam undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Republik Indonesia sangat penting bagi pembangunan perkotaan. Tempatnya berdasarkan asas pengakuan dan asas subsidiaritas desa sebagai subjek dan pembuat pembangunan, tidak lebih dari pembangunan. Undang-undang desa yang memberikan kedaulatan dan kekuasaan kepada desa diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun ditingkat desa dan secara tertib, menjadikan desa sebagai satuan pemerintah kecil pada puncak pembangunan Indonesia "Bangun desa dan bangun desa" merupakan semboyan dan usaha mulia membangun Indonesia dari desa.

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di atas, tanggung jawab desa harus dianggap sebagai anggaran utama negara dalam mengelola semua program dan kegiatan Desa. Dana Desa merupakan yang dihimpun dari APBN, dialokasikan ke desa, disalurkan kepada pemerintah APBD, untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan kegiatan pembangunan dan memberdayakan masyarakat (Miftahudin, 2018:67)

Sesuai peraturan Pembangunan daerah Menteri Desa tertinggal dan migrasi Republik Indonesia isu 4 Tahun 2014 pendirian. BUMDes disetujui dalam musyawarah desa. BUMDes adalah bentuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi sebuah komunitas desa dalam gotong royong, yang kekuatannya didelegasikan kelola seluruh potensi desa dengan melakukan berbagai kegiatan ekonomi (Mahmudah, 2018:81).

Menurut (Terry, 2019:9) pengelolaan sama dengan manajemen pengelolaan sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan bak ilmu maupun seni. Pengelolaan manajemen umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi.

BUMDes yang ada di Desa Pasiripis masih berjalan dan terus mengembangkan usahanya yaitu salah satunya dengan adanya lahan perkebunan seperti pohon kelapa yang berada di daerah gotong royong, yang ditaksir ada 300 pohon kelapa dan yang dibutuhkan masyarakat hanya sekitar 150 pohon kelapa, selain itu BUMDes juga mempunyai lahan tanah di daerah pantai Minajaya yang dibuat bangunan sewa penginapan yang termasuk ke dalam Desa Pasiripis, dengan cara menyewakan tempat yang berada di pesisir pantai Minajaya yang dikelola oleh Karang Taruna. Yang sebagaimana Pantai Minajaya terbagi menjadi dua desa yaitu untuk daerah sebelah kanan termasuk ke dalam desa Pasiripis dan untuk sebelah kiri itu termasuk ke dalam Desa Buniwangi.

Pemerintah Desa membantu penuh keberadaan BUMDes Desa Pasiripis, atas adanya perekonomian BUMDes dapat mendukung kesejahteraan antara pengurus desa, pengelolaan BUMDes dan pemerintah desa yang harus dijaga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

BUMDes harus mengajukan pengaduan pembiayaan yang bertanggung jawab dan transparan mudah dipahami atas laporan keuangan mempertimbangkan berbagai pihak, pemerintah BUMDes wajib membuat laporan keuangan, tentu saja perusahaan komersial penggunaan dana pemerintah masyarakat sebagai modal usaha. Menurut (Anik, 2019:1) dijelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk bertanggung jawab untuk mengelola sumber keuangan mereka sendiri sama sekali laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi diterapkan sehingga akun tahunan dapat dibandingkan dengan akun tahunan perekonomian sebelumnya.

Laporan keuangan berperan penting untuk mengetahui apakah usaha yang akan dijalankan sesuai dengan potensi desa yang ada atau tidak. Oleh karena itu tanggung jawab pelaporan keuangan harus ditekankan dalam pelaporan keuangan agar dapat mencapai tujuan pendirian BUMDes.

Menurut (Mardiasmo, 2018:20) Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan bentuk tata kelola yang baik dalam organisasi nirlaba. Bentuk akuntabilitas diimplementasikan dalam bentuk laporan proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, mulai dari pertanggungjawaban, untuk menjaga kepercayaan publik dan mempertahankan eksistensi pengusaha, untuk mengukur seberapa besar keberhasilan operasi bisnis. ketepatan akuntabilitas organisasi pelayanan publik.

Dengan adanya perkembangan BUMDes di Desa Pasiripis maka pentingnya pembuatan laporan keuangan secara default Akuntansi negara mengirimkan laporan pelaksanaan anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Menjadi bentuk dukungan pada masyarakat untuk mencapai berbagai sektor keuangan. Ketika penghasilan BUMDes bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan harus transparan Pemdes dan kelompok kepentingan terkait standar pembuatan laporan akuntansi, jadi laporan keuangan tahunan dapat diakses dan dibaca oleh publik pihak-pihak yang terlibat dalam laporan keuangan. Bahwa laporan keuangan perjanjian pendanaan masih dalam bentuk buku besar pendapatan dan pengeluaran tidak dikonsolidasikan oleh beberapa operasional BUMDes saat ini.

Oleh karena itu, induk perusahaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pasiripis, lalu harapan dibawa kendali BUMDes, bisa dilakukan dengan baik untuk masalah tersebut meningkatkan kesejahteraan kelompok dan bahkan penduduk desa sendiri, karena selama pembentukan BUMDes Pasiripis masih dikendalikan.

Dapat menerapkan prinsip tanggung jawab, staf bekerja BUMDes mempunyai kualifikasi atau skill yang baik sebab itulah yang dimaksud dengan menjalankan BUMDes. Pengetahuan mengarah pada hasil yang baik sesuai dengan prinsip tanggung jawab.

BUMDes merupakan lokomotif pengembangan ekonomi lokal sesuai dengan kebutuhan, potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa perekonomian masyarakat di desa. Dasar mendirikan BUMDes sebagai lokomotif pengembangan ekonomi lokal mengutamakan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa (ekonomi kerakyatan) didasarkan pada prinsip kolaboratif, inklusif dan empanatoris dan diri sendiri membantu.

Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat tercapai apabila badan usaha Miik Desa (BUMDes) dikelola secara terarah dan profesional. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan solusi dari permasalahan yang ada didesa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat memajukan dan memajukan ekonomi desa, dan keberadaan Badan usaha Milik desa (BUMDes) dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif.

Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berorientasi pada keuntungan. Esensi tata kelola perusahaan adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan keadilan, serta peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak perekonomian Desa, Badan Usaha Pendapatan Desa (PADES) dan sarana percepatan kemajuan Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Berdasarkan hasil informasi wawancara penelitian ini ditujukan kepada Perangkat Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes dan Bendahara BUMDes. Informasi yang diajukan tersusun berdasarkan informasi tentang pengelolaan dan akuntabilitas laporan keuangan setelah itu dipaparkan sesuai dengan pertanyaan.

Dalam proses analisis data selama dan setelah dilapangan serta dalam melakukan analisis data kualitatif menggunakan analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, analisis sering disebut sebagai metode analisis interaktif dimana data kualitatif memiliki tiga fungsi, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi data akan dilanjutkan setelah data lapangan dan laporan akhir selesai. Reduksi data, suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan dan menghilangkan yang tidak perlu. Dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi. Dalam penelitian ini menemukan semua informasi tentang pengelolaan dan laporan keuangan yang sudah terkumpul.

Penyajian data memungkinkan untuk memahami apa yang terjadi selama proses dilapangan. Penyajian data dapat berupa teks naratif, grafik, matriks atau bahan alur (flowchart) dalam menjawab rumsan masalah yaitu mengenai pengelolaan, penyajian laporan keuangan dan tanggung jawab atas laporan keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilihat dari beberapa tahap pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

1. **Perencanaan (planning)**, Pada saat penentuan unit usaha dalam proses musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat ditentukan unit usaha yang akan dijalani dengan mempertimbangkan lahan pohon kelapa, gula merah dan penginapan sewa peluang usaha yang akan memumpuni dan kebutuhan masyarakat, sehingga dipilih usaha yang berjalan saat ini. Dalam tahap perencanaan tentunya juga ditetapkan visi dan misi untuk memastikan dan memperkuat pondasi BUMDes. Penetapan visi dan misi dilaksanakan agar BUMDes memiliki tujuan yang jelas, terarah dan konsisten. Namun dari beberapa pengelola tidak semua pimpinan BUMDes Karya mandiri aktif karena ada beberapa pimpinan yang berada diluar kota dan dalam pekerjaannya secara pribadi.

Tata kerja ini dibuat untuk memudahkan pelaksanaan program kerja pengurus BUMDes yang telah ditetapkan dan sudah memiliki tata kerja yang jelas. Namun, sebagian pengelola BUMDes Karya Mandiri belum sepenuhnya melaksanakan karena pengelolaannya berada diluar kota sehingga sebagian kecil pengelola tidak menjalankannya secara optimal, sehingga kurangnya sumber daya manusia untuk memajukan BUMDes Karya mandiri.

2. **Pengorganisasian (organizing)**, Dalam sampel ini, proses pemilihan atau penetapan kepengurusan BUMDes di desa Pasiripis dilakukan melalui proses musyawarah dengan mengundang tokoh-tokoh penting dan perwakilan masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan ketua BUMDes, Sekretaris dan Bendahara BUMDes kepada Direksi inti BUMDes bersifat terbuka, tanpa ada kepentingan pribadi dibalik penunjukan pimpinan tertinggi BUMDes.

Tentunya setelah kepengurusan BUMDes terpilih akan mendapatkan gambaran struktur organisasi BUMDes dengan orang-orang yang terpilih sebagai bagian dari proses struktur organisasi, yang tentunya melengkapi perangkat BUMDes dan memudahkan untuk mengetahui siapa pengurus BUMDes tersebut.

Tentunya untuk memperlancar pelaksanaan fungsi BUMDes, masing-masing pengelola memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Dengan adanya tanggung jawab tersebut maka pekerjaan setiap pengurus menjadi lebih terorganisir sehingga memungkinkan pengurus fokus pada pekerjaannya. Pengelola BUMDes yang bertindak sebagai pengelola BUMDes tentunya mengontrol dan bertanggung jawab atas apa yang harus dilakukan oleh pengelola yang lainnya. Oleh karena itu, tugas harus dikomunikasikan secara rinci kepada pengurus lain untuk menghindari kesalah pahaman. Namun, tidak sepenuhnya BUMDes Karya Mandiri bertanggung jawab dalam menjalankan tugas BUMDes Karya mandiri dikarenakan terhambat dengan pekerjaan pribadi, sehingga ada yang bertanggung jawab dan tidak.

Memaksimalkan kinerja pengelolaan BUMDes. Tentu tidak luput dari diperlukannya motivasi pengurus BUMDes. Melalui motivasi diharapkan pengurus BUMDes termotivasi untuk bekerja maksimal mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Motivasi tersebut diampaikan oleh pimpinan BUMDes kepada pengurus lainnya, mulai dari Kepala Desa hingga BUMDes.

Hal ini tidak hanya menjadi pendorong untuk memaksimalkan BUMDes, tetapi juga perlu memberikan kritik dan saran yang membangun kepada BUMDes. Kritik dan saran tersebut mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun BUMDes didesanya. Lalu mengapa? Karena lahan pohon kelapa yang berjumlah 300 pohon kelapa hanya 150 pohon kelapa yang hanya dibutuhkan oleh masyarakat setempat hanya sebagian masyarakat saja. Diharapkan penyelenggaraan BUMDes yang dilakukan dengan partisipasi masyarakat akan mampu mendorong perekonomian desa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. **Pelaksanaan (actuating)**, Pelaksanaan ini tentunya menunjukkan sejauh mana program kerja yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana. BUMDes Karya Mandiri dapat dikatakan sudah optimal namun belum banyak menghasilkan keuntungan sehingga masih proses pengerjaan. Pelaksanaan BUMDes juga memerlukan dukungan, kritik dan saran dari berbagai seperti kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat setempat, agar pelaksanaan yang baik untuk dijadikan contoh dalam pengelolaan BUMDes Karya Bersama. Implementasi akan sejalan dengan ketetapan yang ada, namun BUMDes masih perlu memperbaiki model pemasaran dan sistem waktu kerja pengurus BUMDes lainnya agar implementasi BUMDes selanjutnya lebih optimal.

- 4. Pengawasan (controlling)**, Pengendalian yang dituju dalam penelitian ini terkait dengan evaluasi program kerja BUMDes Karya Mandiri yang tujuannya untuk mengetahui kinerja program kerja BUMDes. Sementara ketua BUMDes mengatakan evaluasi program kerja BUMDes dilakukan secara tidak teratur dengan melibatkan anggota BUMDes dan perangkat Desa.

#### **Penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan BUMDes Karya Mandiri setelah dilihat dilapangan pencatatan laporannya masih berupa buku kas biasa pada umumnya ini menunjukkan hanya dana keluar dan sisa saldo transaksi selama satu bulan.

Dari hasil langsung peneliti dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan BUMDes Karya Mandiri belum sepenuhnya maksimal dan masih belum sesuai dengan standar akuntansi yang ada, karena pemegang keuangan BUMDes yang belum terbiasa dengan standar akuntansi yang ada. Namun, BUMDes Karya Mandiri sudah berjalan dengan baik dari waktu ke waktu dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pencatatan keuangan yang disusun oleh BUMDes Karya Mandiri yaitu buku kas umum yang pada umumnya yang merinci dana masuk dan keluar dalam sebulan dan transaksi yang dilakukan dalam 12 bulan. Buku kas umum disiapkan untuk laporan pertanggung jawaban yang dirangkum dalam 12 bulan. Namun, laporan keuangan yang dilakukan BUMDes Karya Mandiri masih berbentuk sederhana. BUMDes Karya Mandiri ini dapat terus mengelola dengan baik semua bidang usaha yang dimilikinya. Bukti informasi keuangan disajikan pada tabel dibawah ini.

#### **Akuntabilitas vertikal**

Laporan keuangan BUMDes Karya Mandiri yang disampaikan kepada pihak Pemerintah Desa (internal) merupakan laporan keuangan BUMDes yang dibuat satu bulan sekali. Namun laporan keuangan disampaikan satu tahun sekali bersama BUMDes kepada BPD dan pihak forum beserta laporan evaluasi program kerja BUMDes Karya Mandiri. Kepala BUMDes bersama pengurus desa wajib berunding soal ini. Menggunakan pelaporan keuangan BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban selama satu Tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola BUMDes Karya mandiri bahwa pengelolaan BUMDes baik pelaporan keuangan BUMDes maupun laporan lainnya. Menyampaikan laporan keuangan blanan kepada pengurus desa palling lambat akhir tahun. Setelah menyelesaikan buku tersebut, pengurus BUMDes dan pemerintah desa harus membahas laporan keuangan BUMDes yang harus dimusyawarahkan terkait pelaporan keuangan BUMDes, sebagai rasa tanggung jawab selama satu tahun. Namun dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh aparat pemerintah, BPD, dan masyarakat lainnya.

#### **Akuntabilitas Horizontal**

Berdasarkan wawancara dengan pengelola BUMDes bahwa laporan keuangan BUMDes Karya Mandiri yang disampaikan BUMDes ke BPD (eksternal) juga tidak berbeda jauh dengan hasil laporan keuangan yang disampaikan BUMDes ke pengurus Desa (internal).

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut ditarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa pengelolaan BUMDes Karya Mandiri di Desa Pasiripis berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan terstruktur terorganisasi. Demi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan visi dan misi dilakukan agar BUMDes memiliki tujuan yang jelas, terarah dan konsisten. Dalam sampel ini pemilihan atau keputusan pimpinan BUMDes Desa Pasiripis dilakukan melalui proses musyawarah dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan rakyat. Oleh karena itu, pemilihan ketua BUMDes, sekretaris, dan Bendahara BUMDes terbuka bagi pengurus inti BUMDes tanpa ada kepentingan pribadi untuk mengangkat pengurus pimpinan tinggi BUMDes. Pimpinan BUMDes yang bertindak sebagai pimpinan BUMDes tentunya memiliki kontrol terhadap apa yang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh pimpinan lainnya. Namun BUMDes Karya Mandiri tidak memikul tanggung jawab penuh atas pemenuhan tugas BUMDes Karya Mandiri, karena terhalang oleh pekerjaan pribadi, sehingga ada yang menjadi penanggung jawab dan ada yang tidak..

Kedua penyajian laporan keuangan BUMDes Karya Mandiri sudah berjalan sesuai dengan baik sesuai peraturan Pemerintah Daerah. Namun, dilapangan pelaporannya masih berupa buku besar biasa

yang pada umumnya hanya menampilkan dana yang keluar dan sisa saldo transaksi pada bulan tersebut.

Yang menyatakan bahwa pelaksanaan operasional BUMDes Karya mandiri berwenang untuk menyiapkan laporan keuangan untuk seluruh unit usaha di BUMDes setiap bulan.

Ketiga akuntabilitas laporan keuangan BUMDes Karya Mandiri yang sudah membuatkan pelaporan keuangan dari segi akuntabilitas vertikal (internal) dan akuntabilitas (eksternal) secara terbuka dan sesuai dengan dokumen Pemerintah Desa.

## DAFTAR LITERATUR

- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62-72.
- Anam, M. C. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Tanah Pembangunan Kilang Minyak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 (Studi Kasus Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban).
- Anonim. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Departemen Pendidikan Nasional. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Brawijaya.
- Apriliani, R., Nurhayati, N., & Purnama, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kuningan. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(2), 172–189.
- Ardiansyah, F. (2022). *Peranan Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Bumdes Di Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85-94.
- CRESWELL, J. W. (2016). *Pedekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dariana, D., & Harrie, A. M. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 124-139.
- Dina, I., & Diana Elvianita, M. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis*, 2017, 41–51.
- Dwiyanto Agus, (2014), *Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, Jakarta.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). Kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Indonesia: Elex Media Komputindo.
- Firdaus, R. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1387-1394.
- Gayo, S. B., Erlina, E., & Rujiman, R. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. *Media Komunikasi Geografi*, 21(2), 202-209.
- Gusnardi, A. H. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Haeruddin, H., & Mariana, L. (2021). Analisis Sistem Akuntansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)(Studi Kasus: BUM Desa di Kec. Galesong Utara Kabupaten Takalar). *AkMen Jurnal Ilmiah*, 18(1), 36-45.
- Hendri, J., & Akmal Indra, K. PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEBAUK.
- Hidayat, w. w. (2018). *dasar dasar analisis keuangan*. jakarta: uwais inspirasi indonesia.
- kbbi.web.id/kelola Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

- INDONESIA, P. R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia*.
- Indra Surya & Ivan Yustiavandana. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta
- Jayanti, Dwi, Masyhad dan Nurul Qomari. 2018. Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Surya Sejahtera” Di Desa
- Kasmir. (2008). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada .
- Kiha, E. K., & Mitang, B. B. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tapenpah Kecamatan Insana Induk Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Aksara Public*, 3(4), 248-259.
- M.A.B, D. D. (2020). *DASAR DASAR MEMAHAMI RASIO LAPORAN KEUANGAN*. Yogyakarta: UNY Press.
- Mahfud, M., Ismail, T., Zoelva, H., Maarif, A. S., ASP, M. J., Hidayat, A., ... & Tanudirjo, D. A. (2012). *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Pusat Studi Pancasila UGM.
- Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). *Ecopreneur.12*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.51804/econ12.v1i2.376>
- Manosoh Hendrik, (2016). *Good Corporate Ggovernance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan keuangan*. Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mahardika, M. A. (April 2021). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV BUDI UTOMO.
- Maslika, Sopanah, A., & Prawestri, H. P. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 35, 174–190.
- Murtiningsih, S., Probowulan, D., & Nastiti, A. S. (2021). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Kabupaten Banyuwangi. *Baswara, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 42–51.
- Nadhif, M. N. (2021). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Electronic Media Kompotindo
- Patarai, D. H. (2015). *OMBUDMANS DAN AKUNTABILITAS PUBLIK*. Makasar: De La Macca.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Pramita, Y. D. (2018). Analisis Pemahaman Permendes No. 4 Tahun 2015 Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pada Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 1-8.
- Purba, S., Nainggolan, A., & Telaumbanua, A. G. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Bumdes Famohouni Di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara. *Kurs : Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 6(2), 188–194. <https://doi.org/10.35145/kurs.v6i2.1644>
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Ririhena, M. Y., & Goraph, F. A. (2020). Model Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Marahai Pitu. *MAREN: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 133–142. <http://ojs.ukim.ac.id/index.php/maren/article/view/512>
- Saputra, A., Utami, I., & Kristianti, I. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Potensi Whistleblowing atas Penyalahgunaan Dana. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(1), 13-28.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhu, B. Ia, Djae, R. M., & Sosoda, A. (2021). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government of Archipelago*, 1(1), 6. <http://www.jurnal.ummu.ac.id/898c826d-3bba-4ccf-8fa4-355780b90656>.
- Susilowati, D. (2020). *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo Pada BUMDEs Sinar Harapan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Syahrman, S. (2021). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENILAI KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. NARASINDO MITRA PERDANA. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 283-295.
- Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *GOVERNANCE*, 1(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Volume, A., Manado, S. R., & E-mail, I. (2022). 3 1,2,3. 11(2), 33–42.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218-234.
- Yuliarti, N. C. (2021). (*Peer review+ Similarity+ Dokumen*) **TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BUMDes KARYA MANDIRI PADA PELAPORAN ASET DESA**. 134–145.